



# MUSRENBANG

## RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2025

### KABUPATEN SUMEDANG



Drs. Bob RF Sagala, M.Si  

---

PEIPD Bina Bangsa - Kemendagri



# PENDAHULUAN





# NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA



Presiden Pemegang  
Kekuasaan Pemerintahan  
(Ps. 4 UUD 45)

## Tujuan Negara: (UUD 45 alinea 4)

- 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- 2) memajukan kesejahteraan umum;
- 3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- 4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial



## Otonomi Daerah: (Ps. 18 UUD 45)

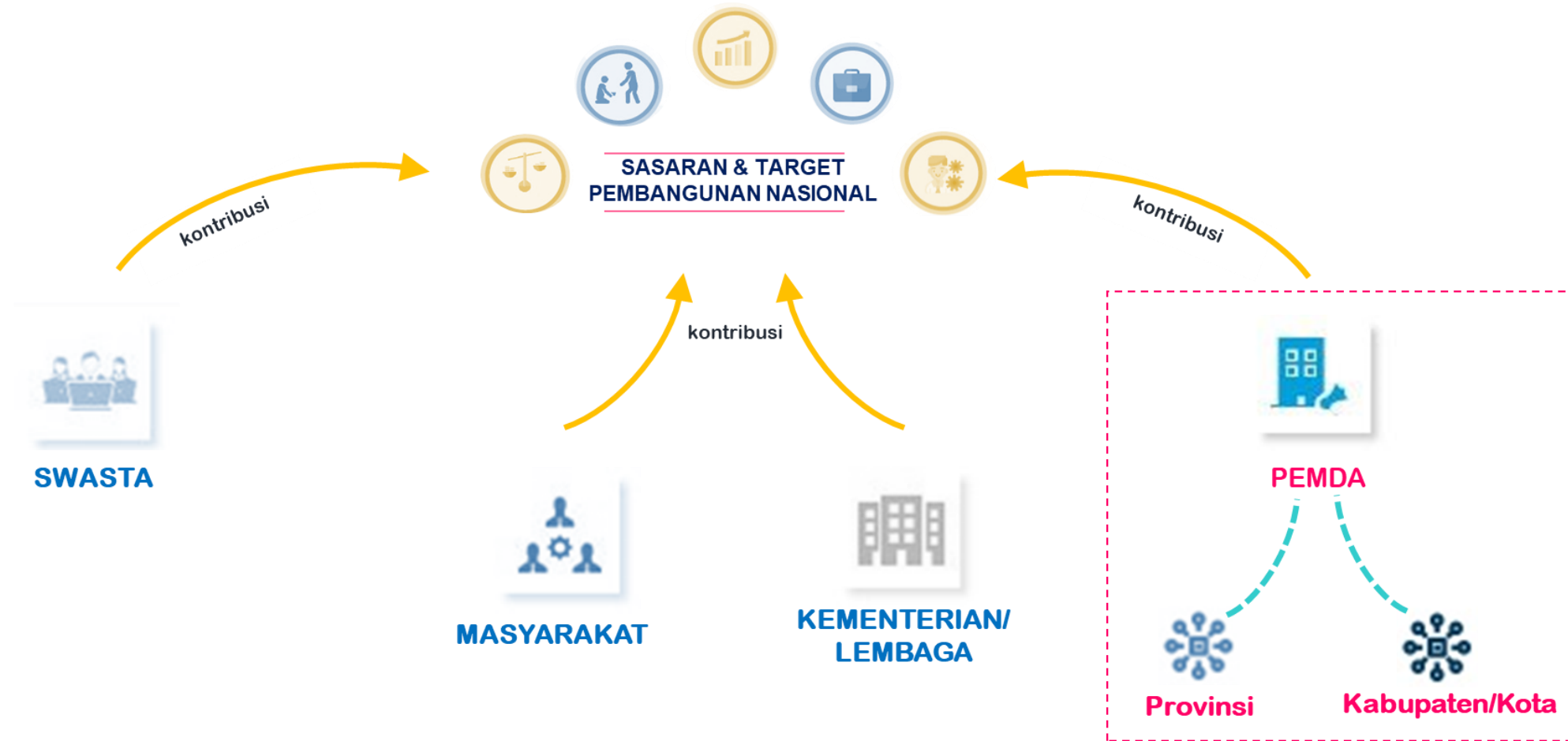
- 1) NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota
- 2) Otonomi menjadi upaya mempercepat tercapainya tujuan negara dan mendekatkan pemerintah dengan masyarakat

Pemerintah sebagai personifikasi negara bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat





# KONTRIBUSI DAERAH UNTUK NASIONAL



Selain melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan, daerah juga diharuskan untuk berkontribusi pada pencapaian target pembangunan nasional



CAMBODIA 2023



32nd SEA GAMES



CAMBODIA 2023



32nd SEA GAMES







**KOMPAS.com**

JERNIH MELIHAT DUNIA



# PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 258 UU 23/2014

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional

TARGET  
PEMBANGUNAN NASIONAL



kontribusi



K/L + PROV+KAB/KOTA

sinkronisasi dan harmonisasi koordinasi teknis dikoordinasikan oleh Mendagri dengan Menteri Bidang Perencanaan



TARGET  
PEMBANGUNAN PROVINSI



kontribusi

PROV + KAB

koordinasi teknis pembangunan dilaksanakan oleh GUBERNUR sebagai wakil Pemerintah Pusat



MENDUKUNG DAN MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DAERAH UNTUK:



Peningkatan & Pemerataan Pendapatan Masyarakat



Peningkatan & Pemerataan Daya Saing Daerah



Peningkatan & Pemerataan Kesempatan Kerja



Peningkatan & Pemerataan Lapangan Berusaha



Peningkatan & Pemerataan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik



[www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id)



Kemendagri\_RI



kemendagri



kemendagri



# BERBAGAI AKTIFITAS MENUJU PERSIB JUARA

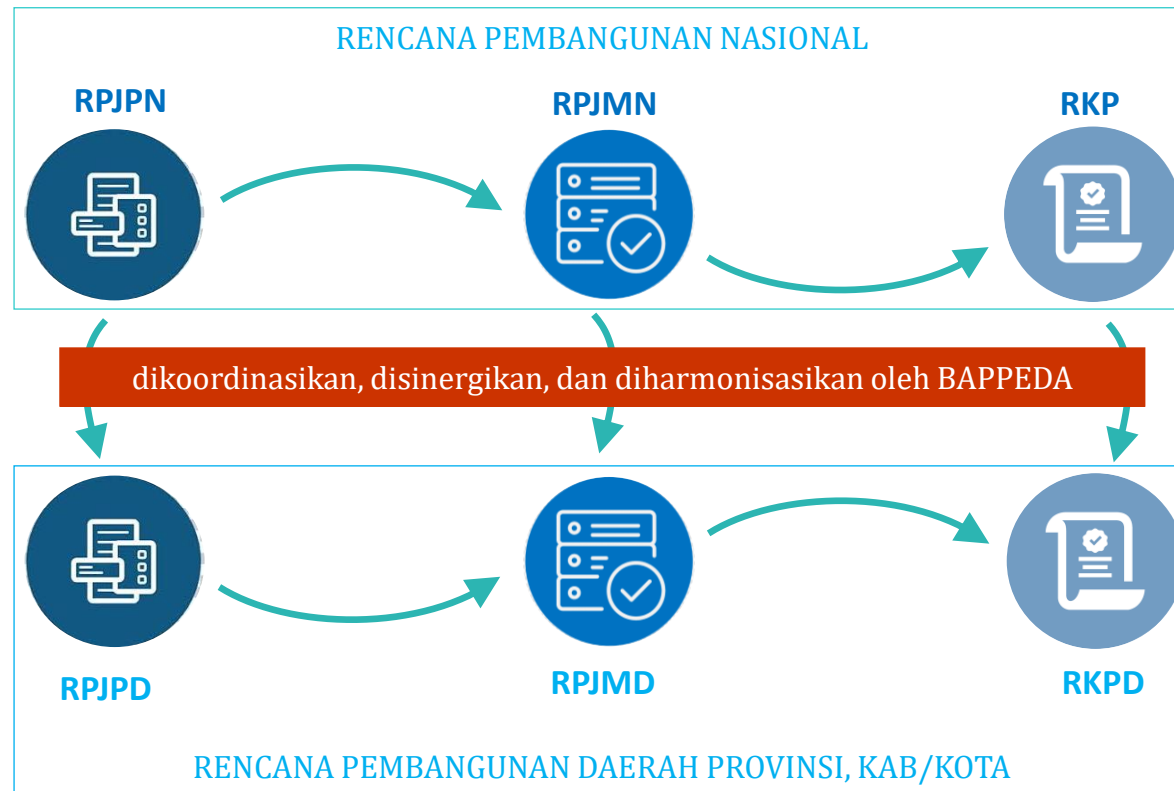






# PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional



Menggunakan pendekatan:

- teknokratik,
- partisipatif,
- politis,
- atas-bawah
- dan bawah-atas.



Dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.



# RKPD 2025



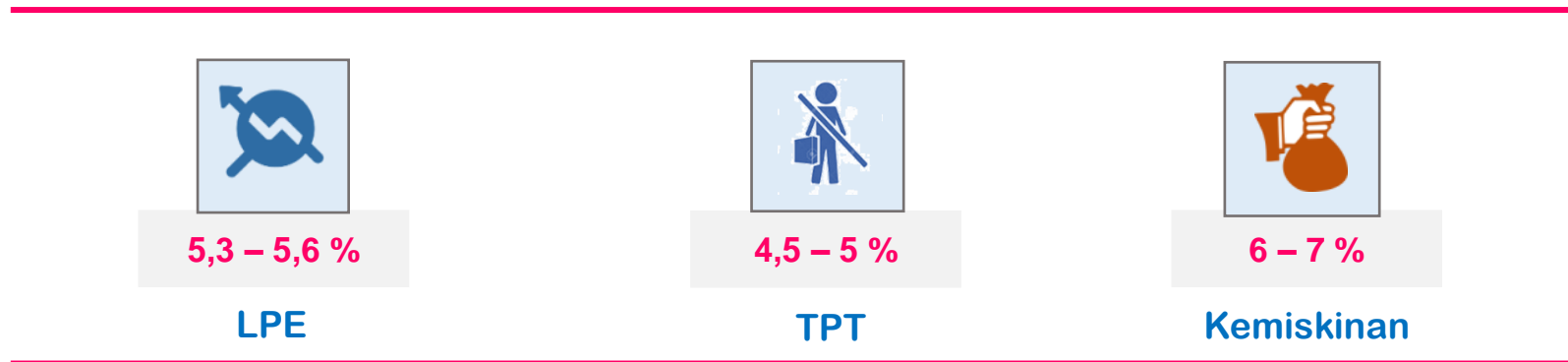


“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”



Fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat atau *well-being* serta konvergensi atau pertumbuhan yang makin merata antardaerah

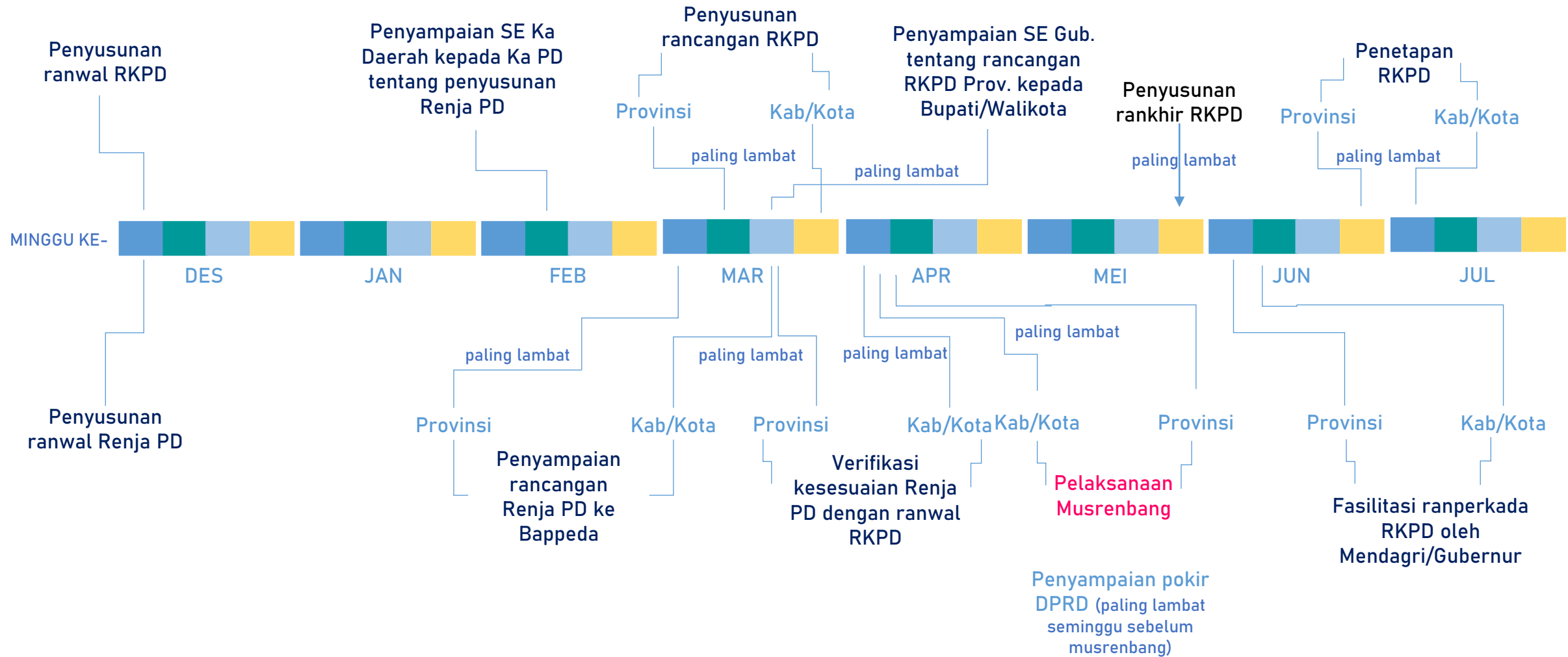
TARGET





# TIMELINE PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2025

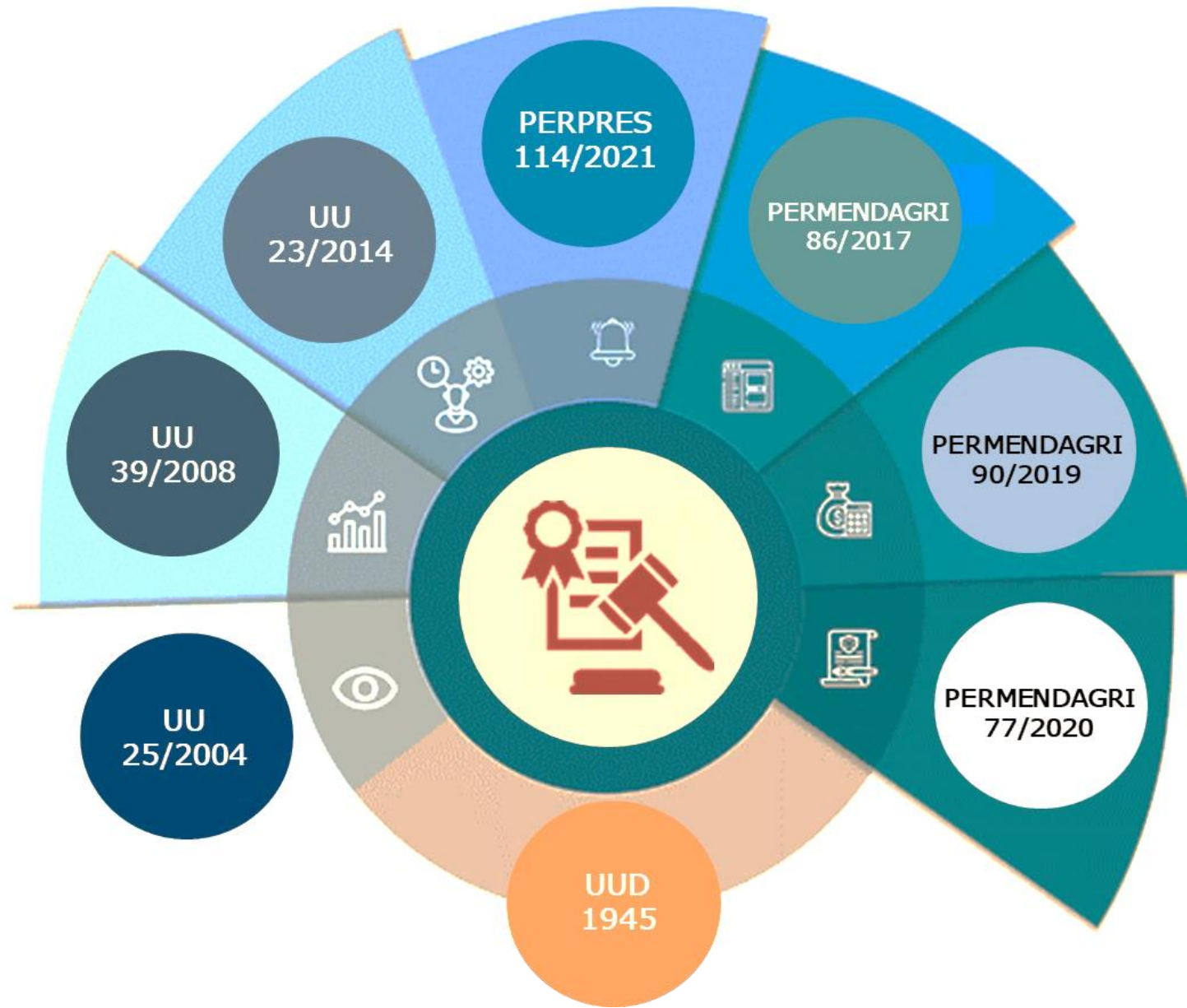
Pelaksanaan Forum PD/ Lintas PD (dilaksanakan 2 minggu setelah SE Ka Daerah tentang Renja PD)







# DASAR HUKUM PENYUSUNAN RKPD 2025





Selain itu, RKPD Tahun 2025 memuat urusan kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah







# PENYUSUNAN RKPD KAB. SUMEDANG TAHUN 2025



## MEMPERHATIKAN

RKP 2025

RKPD Jawa Barat 2025

RPD Kab. Sumedang 2024-2026

Dokumen Perencanaan



Isu-isu strategis

Regulasi Terbaru



Hasil Rakortekrenbang

Permendagri tentang  
Pedum RKPD 2025



Pokir DPRD



Hasil pengendalian dan  
evaluasi





**1** Stabilitas politik dan pemerintahan pasca Pilpres dan Pilkada Serentak Tahun 2024

**2** Ekonomi inklusif dan berkeadilan

**3** Percepatan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan

**4** Daya saing dan keamanan digital

**5** Peningkatan kualitas SDM

**6** Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim

**7** Ketahanan air, pangan, dan energi

**8** Masyarakat inklusif dan berbudaya

**9** Tata kelola pemerintahan adaptif dan inovatif





# ISU STRATEGIS KABUPATEN SUMEDANG

- 1 Stabilitas politik dan pemerintahan pasca Pilkada Serentak Tahun 2024
- 2 Optimalisasi potensi ekonomi
- 3 Pembangunan infrastruktur yang merata
- 4 Peningkatan kualitas SDM
- 5 Perubahan iklim dan ketahanan bencana
- 6 Tata Kelola pemerintahan yang inovatif





## Pemda Sumedang Investasikan Rp 10,8 Miliar untuk Pembangunan Jalan Usaha Tani

RADARSUMEDANG.id, KOTA – Pemda Kabupaten Sumedang telah menganggarkan Rp 10,8 miliar untuk pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT). Pj

Berita Utama ⌚ 5 jam ago

Berita

## Diskanak Sumedang Verifikasi Data CPCL Kelompok Tani Penerima Bantuan Ternak Domba DBHCHT 2024

 Acep Sandi  
24 Maret 2024

## Guncangan Gempa Bumi Terasa di Sumedang, Warga Berhamburan Keluar Rumah

Guncangan gempa bumi dirasakan di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Jumat (22/3/2024) sore.

Sumedang ⌚ 2 hari lalu

## Mahasiswa di Sumedang Kritis usai Dikeroyok, Kepalaanya Dijadikan Bola Sepak

Setelah terjatuh, diduga kepala korban ditendang hingga terluka berat. Korban alami luka robek di bagian pelipis sebelah kanan

Sumedang ⌚ 2 hari lalu  Share  Share

Berita

## BPBD Sumedang Pastikan Lokasi Lahan Perumahan di Pamulihan Rawan Bencana

 Iman Nurman  
24 Maret 2024

## Pj Bupati: Jika Ada 'Bullying', Tekan Tombol Darurat di Tahu Sumedang

RADARSUMEDANG.id, KOTA — Sebagai bentuk antisipasi terjadinya bullying (perundungan) dan kekerasan terhadap anak, kini di aplikasi 'Tahu Sumedang'

Berita Utama ⌚ 2 hari ago  Sebar  Tweet



# ARAHAN PENYUSUNAN RKPD KAB. SUMEDANG 2025

1

Memastikan kesinambungan dan sinkronisasi kinerja, indikator kinerja, dan target penyelenggaraan urusan dalam Permendagri 10/2023 (dilanjutkan dalam Pedum RKPD 2025)

2

Mempertimbangkan hasil dalev kinerja RPD, dan hasil dalev Renstra PD (hasil evaluasi kinerja RKPD & Renja tahun sebelumnya [2022 dan 2023])

3

Memperhatikan penyelarasan target pembangunan nasional antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan kota dalam dokumen perencanaan;

4

Memastikan hasil koordinasi teknis perencanaan telah ditindaklanjuti secara konsisten dalam dokumen perencanaan;

5

Memastikan PD menyusun Renja PD 2025.





TERIMA  
KASIH



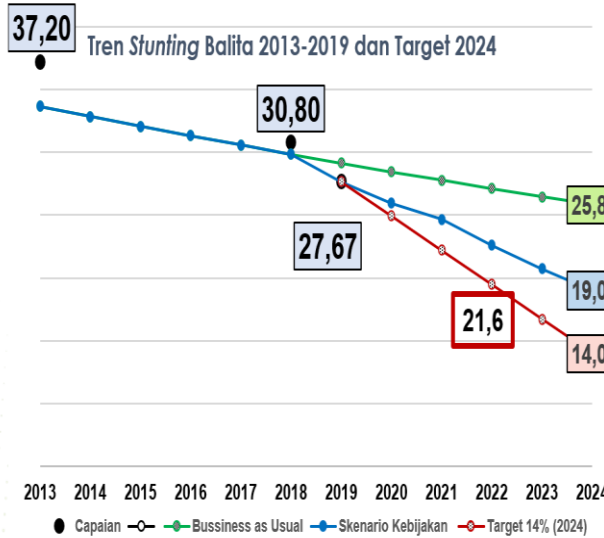


# PENURUNAN PREVALENSI STUNTING

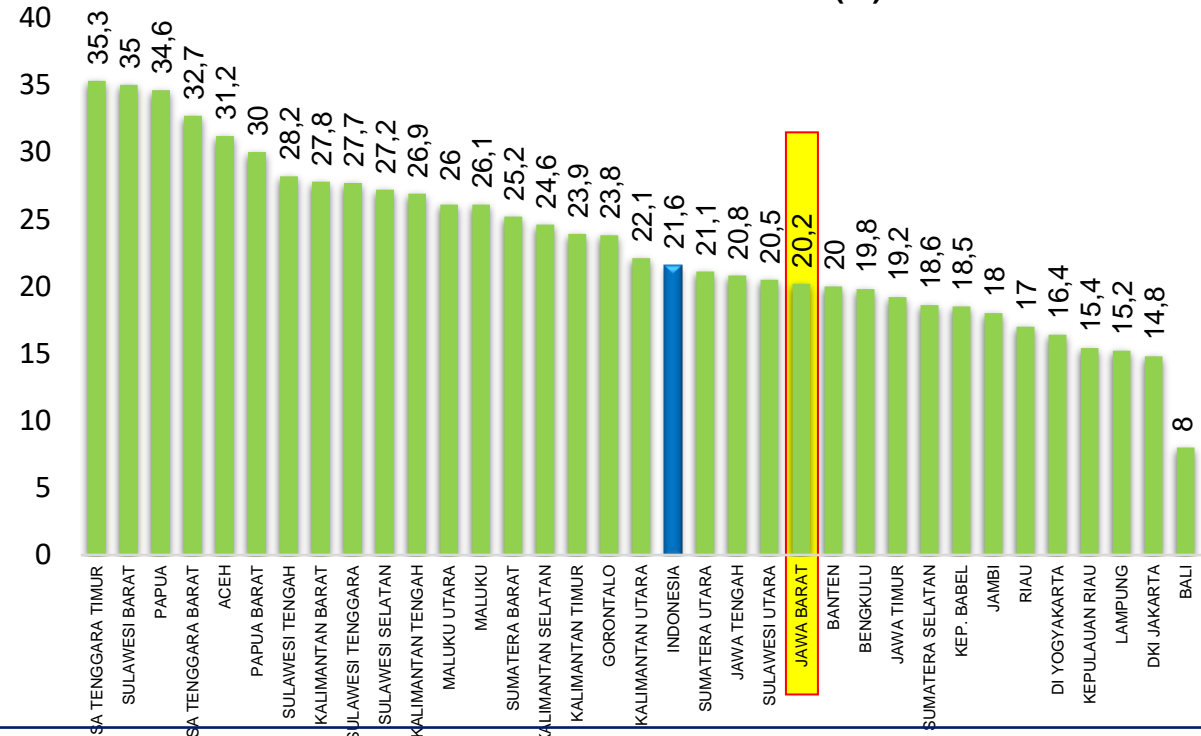


**21,6%** Balita di Indonesia mengalami *stunting* (SSGI, 2022)

TARGET PENURUNAN STUNTING (%)					
2019	2020	2021	2022	2023	2024
27,7%	24,1%	21,1%	18,4%	16%	14%



### PREVALENSI STUNTING 2022 (%)



1. Data detail Ibu hamil, Anak-anak di bawah 2 tahun, **by name by address, data berasal dari bottom up (dari desa ke Kab/Kota → Provinsi).**
2. Membuat **inovasi** penanganan, seperti pembuatan **platform (aplikasi pelaporan berbasis digital)** dll
3. Melakukan **intervensi** kepada yang kurang mampu melalui **bantuan sosial makanan bergizi (konsumsi ikan → bukan mie instan atau biskuit).**
4. Melaksanakan **evaluasi rutin (rapat koordinasi)** kepada Kab/Kota.

\*Data belum termasuk 4 DOB Papua

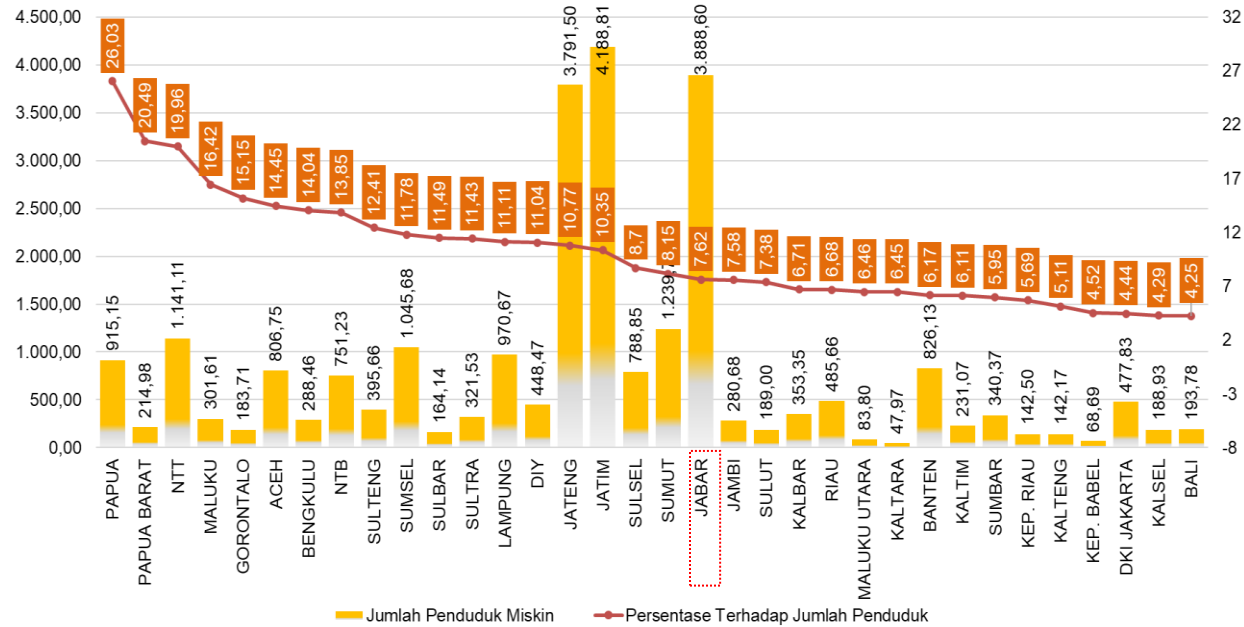
Sumber: SSGI Kemenkes, diolah 13 Januari 2024



# PENGENTASAN KEMISKINAN EKSTREM

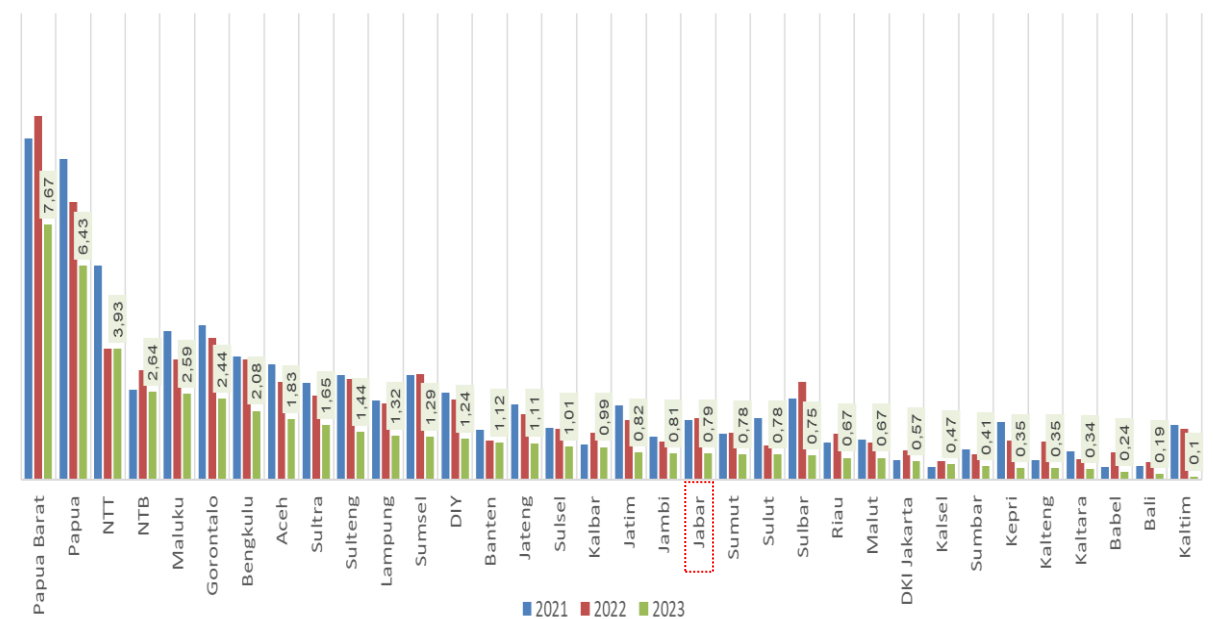
## JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MARET 2023

NASIONAL: **9,36% (25.898.550 JIWA)**



## TINGKAT PERSENTASE KEMISKINAN EKSTREM PER PROVINSI TAHUN 2021-2023

Tingkat Kemiskinan Ekstrem Maret 2023 sebesar: **1,12%**



1. Lakukan **pengecekan** penduduk miskin dan miskin ekstrem dengan **pendataan detail by name by address, data berasal dari bottom up (dari desa ke Kab/Kota → Provinsi).**
2. **Pelajari penyebab kemiskinan dan kemiskinan ekstrem** yang terjadi di daerahnya dan lakukan tindakan **intervensi**, misalnya karena kurangnya sarana air bersih, sarana jalan rusak dll.
3. Lakukan **koordinasi dengan Kab/Kota (Doing Sharing)**, apakah bisa dikerjakan bersama atau bisa oleh Kab/Kota sendiri.
4. **Reward dan punishment** bagi daerah Kab/Kota dlm pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem (Kompetitif)

\*Data belum termasuk 4 DOB Papua

Sumber: Ditjen Bina Bangda, diolah 13 Januari 2024







# PENGEMBANGAN *GOVERNMENT TECHNOLOGY* (GOVTECH) DAN *DIGITAL ID* MELALUI KETERPADUAN LAYANAN DIGITAL: Dukungan Kemendagri

1. Menerbitkan **SE MENDAGRI Nomor 000.9.3.2/92/SJ tanggal 5 Januari 2024** Kepada Gubernur/Bupati/Walikota; Hal: Peran Pemerintah Daerah dalam Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
2. **Menerapkan Identitas Kependudukan Digital (IKD)** sebagai aplikasi yang berfungsi untuk mentransformasi dokumen kependudukan khususnya KTP elektronik menjadi bentuk digital
3. **Mendorong pemanfaatan data kependudukan** melalui kerjasama dengan Lembaga pengguna pusat, daerah, dan swasta, serta **melakukan transformasi digital pada program Administrasi Kependudukan**, seperti Transformasi dokumen kependudukan menjadi data kependudukan, Merubah kertas *security printing* menjadi QR code, Anjungan Dukcapil Mandiri, dan Identitas Kependudukan Digital.
4. **Melakukan peningkatan jaringan komunikasi data, pemanfaatan server dan storage** untuk mendukung *Data Center* di Merdeka Utara, Kalibata dan *Data Recovery center* (DRC) Batam.
5. **Membangun Perangkat Jaringan dan Keamanan Jaringan yang diperkuat dengan pemantauan langsung (SOC dan NOC) serta penggunaan API Manajemen** untuk pembaruan sistem. Kapasitas Data Center dapat saling mendukung, memudahkan pengelolaan dan pembaruan, dan hanya memerlukan satu *firewall* untuk keamanan semua Data Center.
6. **Mendorong dan membina daerah untuk mengintegrasikan kebijakan nasional terkait pemerintahan digital** dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah
7. **Melakukan sinkronisasi pembangunan** antara pemerintah pusat dan daerah serta antar pemerintah daerah **untuk mempercepat implementasi kebijakan pemerintahan digital**
8. **Melakukan integrasi SIPD dengan sistem K/L lain dan Lembaga perbankan**, serta mendorong penerapan SIPD dalam **perencanaan dan penganggaran di daerah.**
9. **Mendorong pembentukan MPP di daerah** untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai administrasi dan layanan publik yang transparan, mudah, cepat, terjangkau, aman, dan nyaman.





## LATAR BELAKANG IKD

- **Dasar Hukum IKD** yaitu **Permendagri Nomor 72 Tahun 2022** tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. **Ditetapkan pada tanggal 1 April 2022** dan Diundangkan pada tanggal 13 April 2023.
- Upaya untuk **mewujudkan layanan yang cepat, akurat, lengkap dan gratis**, maka inovasi perlu terus dilakukan.
- Diperlukan **sistem digital terpercaya berupa Identitas Digital Kependudukan** yang berasal dari penyelenggara layanan adminduk yaitu Ditjen Dukcapil, Kemendagri.
- **Beban pelayanan yang semakin meningkat** sementara anggaran Adminduk semakin berkurang.

## IKD KE DEPAN (TRANSFORMASI IKD)



1. Digital wallet (menyimpan dokumen resmi)
2. *Single Sign On* untuk Pelayanan Pemerintah dan Swasta
3. Berbagi Data dengan *Consent* /Persetujuan Pemilik Data (Satu Data)
4. Fitur aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya
5. Adopsi standar internasional untuk interoperabilitas (e.g. *W3C Verifiable Credentials*)

## IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD)

CAPAIAN IKD NASIONAL  
**21 Januari 2024**

Aktivasi IKD dapat dilakukan di 514 Kabupaten/Kota.

**TOTAL: 7.520.419**

IKD dipersiapkan menjadi **Identitas Digital untuk Perorangan** yang resmi, gratis dan universal dari Pemerintah Indonesia untuk warga negara dan penduduk Indonesia.

Sumber: Ditjen Dukcapil Kemendagri, Diolah 21 Januari 2024

